

# ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA ROKOK ELEKTRONIK (STUDI KASUS KOTA TANJUNGPINANG)

Oleh  
**Riana Wijiana**  
**NIM. 2105040021**

## Abstrak

Rokok elektronik semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di Kota Tanjungpinang, meskipun mengandung zat adiktif yang berisiko terhadap kesehatan seperti kanker dan hipertensi. Pemerintah telah mengatur kewajiban pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok elektronik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur secara rinci bentuk, ukuran, posisi, dan konten visual peringatan tersebut. Namun, implementasi ketentuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan efektivitas ketentuan pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik di Kota Tanjungpinang dari perspektif yuridis. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum, observasi lapangan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas produk rokok elektronik di Kota Tanjungpinang tidak memenuhi standar peringatan kesehatan, baik dari aspek bentuk, ukuran, maupun visual. Pengawasan oleh instansi terkait cenderung berfokus pada aspek fiskal (cukai) dan kurang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sosialisasi regulasi. Berdasarkan teori penegakan hukum Joseph Goldstein, penegakan hukum saat ini berada pada level *actual enforcement* berada pada tingkat yang sangat rendah akibat keterbatasan struktural dan operasional sehingga efektivitas regulasi belum optimal. Penelitian menyimpulkan perlunya kewajiban pencantuman peringatan kesehatan secara jelas pada produk sebelum pengurusan pita cukai, serta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda.

Kata Kunci: Peringatan Kesehatan, Implementasi Regulasi, Penegakan Hukum

**JURIDICAL ANALYSIS OF HEALTH WARNING  
PROVISIONS ON ELECTRONIC CIGARETTES  
(CASE STUDY IN TANJUNGPINANG CITY)**

**By  
Riana Wijiana  
NIM. 2105040021**

***Abstract***

*Electronic cigarettes are increasingly popular among the public, including in Tanjungpinang City, despite containing addictive substances that pose health risks such as cancer and hypertension. The government has regulated the obligation to include health warnings on electronic cigarette packaging through Law Number 17 of 2023 on Health and Government Regulation Number 109 of 2012, which details the form, size, position, and visual content of such warnings. However, the implementation of these provisions in practice shows a significant gap between legal norms and practice. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of health warning provisions on electronic cigarettes in Tanjungpinang City from a juridical perspective. Using a normative-empirical legal approach, this research combines legal document studies, field observations, and surveys. The findings reveal that the majority of electronic cigarette products in Tanjungpinang City do not meet health warning standards in terms of form, size, or visual elements. Supervision by relevant agencies tends to focus on fiscal aspects (excise) and pays insufficient attention to public health aspects, exacerbated by limited human resources and minimal regulatory socialization. Based on Joseph Goldstein's law enforcement theory, current law enforcement is at the actual enforcement level, which is very low due to structural and operational limitations, resulting in suboptimal regulatory effectiveness. The study concludes that there is a need for mandatory clear health warning requirements on products before excise stamp processing, as well as revision of Government Regulation Number 109 of 2012 to ensure public health protection, particularly for the younger generation.*

*Keywords: Health Warning, Regulatory Implementation, Law Enforcement*